

PENINGKATAN ADVOKASI KEBIJAKAN MELALUI PELATIHAN PENULISAN POLICY PAPER BAGI PENELITI LITBANG KABUPATEN ALOR

Laurensius P. Sayrani¹, David B.W. Pandie², I Putu Yoga Pradana^{3*},
Alfred Omri Enamau⁴, Maria Lisa Wanda Ndoka⁵, Piter Lemanah⁶
^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
yoga.pradana@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Policy paper merupakan alat penting dalam advokasi kebijakan publik, memberikan rekomendasi berbasis bukti secara ringkas untuk pembuat kebijakan. Namun, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan *policy paper* di kalangan peneliti Litbang Kabupaten Alor menjadi hambatan dalam mendukung pengambilan kebijakan yang efektif. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 30 staf Litbang melalui pelatihan yang mencakup ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi. Peserta memperoleh hardskill, seperti teknik penulisan *policy paper* yang mencakup analisis masalah, formulasi opsi kebijakan, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti, serta softskill, seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi kolaboratif, dan pengambilan keputusan strategis. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor peserta dari 48% pada pre-test menjadi 82% pada post-test, mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam pelatihan. Selain itu, lebih dari 75% peserta aktif terlibat dalam diskusi dan simulasi praktik, yang memperkuat keterampilan teknis dan kolaborasi mereka. Program ini menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan untuk menghasilkan *policy paper* yang inovatif dan strategis guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kata Kunci: Policy Paper; Advokasi Kebijakan; Kebijakan Public.

Abstract: Policy papers are essential tools in public policy advocacy, providing concise, evidence-based recommendations for policymakers. However, limited knowledge and skills in policy paper writing among researchers at Litbang Kabupaten Alor have hindered effective policy decision-making. This Community Service Program (PkM) aimed to enhance the understanding and skills of 30 Litbang staff through training sessions comprising lectures, interactive discussions, and simulations. Participants acquired hard skills, such as policy paper writing techniques involving problem analysis, formulation of policy options, evidence-based recommendations, and soft skills, including critical thinking, collaborative communication, and strategic decision-making. Evaluation results indicated a significant improvement in participants' scores, from an average of 48% in the pre-test to 82% in the post-test, reflecting the success of the participatory approach employed during the training. Additionally, more than 75% of participants actively engaged in discussions and practical simulations, further strengthening their technical and collaborative skills. This program underscores the importance of continuous training and mentoring to produce innovative and strategic policy papers that support effective governance.

Keywords: Policy Paper; Policy Advocacy; Public Policy.



Article History:

Received: 22-12-2024
Revised : 13-01-2025
Accepted: 14-01-2025
Online : 15-02-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Policy paper atau kertas kebijakan merupakan salah satu instrumen penting dalam advokasi kebijakan public (Stylianios Kostas, 2017). Dokumen ini dirancang untuk memberikan gambaran singkat namun jelas tentang isu tertentu, yang dipandang memerlukan perhatian khusus dari pembuat kebijakan. Dengan format yang ringkas dan padat, *policy paper* memungkinkan pengambil keputusan memahami inti permasalahan, penyebabnya, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya (Fan et al., 2021; Young & Quinn, 2002). Dalam praktiknya, *policy paper* menjadi jembatan antara penelitian akademik dan kebutuhan informasi praktis bagi pembuat kebijakan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Figueroa & Verma, 2023).

Di sisi lain, pemerintah, khususnya pada tingkat lokal, membutuhkan informasi berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran (Zhang et al., 2020). Informasi tersebut harus disajikan secara singkat, mudah dipahami, bebas dari istilah teknis yang rumit, serta mencakup rekomendasi yang relevan. Dalam konteks ini, *policy paper* menjadi alat strategis untuk menyampaikan informasi dan hasil penelitian secara efisien kepada pembuat kebijakan (Bache, 2020). Kelebihan lainnya adalah *policy paper* dapat disiapkan dalam waktu singkat tanpa harus menunggu hasil penelitian yang kompleks selesai, sehingga dapat disampaikan tepat waktu untuk mendukung kebutuhan kebijakan tertentu (Ritter et al., 2018).

Namun, pemanfaatan *policy paper* di Indonesia, khususnya di tingkat lokal, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan peneliti dan staf pemerintah dalam menyusun *policy paper* yang sesuai dengan kebutuhan pembuat kebijakan (Kristian, 2023). Hal ini menjadi tantangan khusus bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kabupaten Alor, yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan publik di wilayahnya. Kurangnya pelatihan dan pengalaman dalam menyusun *policy paper* membuat rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak relevan atau sulit dipahami oleh pengambil keputusan (Widodo, 2021).

Kabupaten Alor, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tantangan besar dalam mengelola isu-isu kebijakan lokal. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, Litbang Kabupaten Alor menghadapi tekanan untuk menghasilkan dokumen kebijakan yang relevan dan berbasis bukti guna mendukung pengambilan keputusan strategis (Agustino, 2016; De Marchi et al., 2016). Namun, keterbatasan pengetahuan tentang konsep advokasi kebijakan dan teknik penulisan *policy paper* sering kali menjadi kendala utama. Akibatnya, potensi Litbang untuk memberikan kontribusi signifikan dalam proses pengambilan kebijakan belum dapat dioptimalkan (Giest, 2017).

Lebih jauh lagi, advokasi kebijakan berbasis bukti masih menjadi hal baru di lingkungan birokrasi lokal, termasuk di Kabupaten Alor. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan advokasi berbasis bukti di daerah disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan budaya birokrasi yang cenderung prosedural (Rakhsan et al., 2023; Susilawati et al., 2022). Persepsi bahwa advokasi kebijakan bukan merupakan kompetensi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) turut memperlambat adopsi pendekatan berbasis bukti (Izdihar et al., 2023). Selain itu, kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis dalam menyusun *policy paper* membuat proses perumusan kebijakan sering kali tidak efektif (Jamil et al., 2022). Pendekatan berbasis praktik, seperti pelatihan intensif, telah diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas birokrasi daerah dalam merancang rekomendasi kebijakan yang akurat dan relevan (Rusliandy, 2022a). Padahal, kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk menangani isu-isu kebijakan lokal yang kompleks dan membutuhkan solusi berbasis data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas peneliti dan staf Litbang Kabupaten Alor dalam menyusun *policy paper* berbasis bukti. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang melibatkan simulasi dan diskusi kelompok dapat memperkuat keterampilan analisis kebijakan (Emilda et al., 2022; Rasaili & Arifin, 2022). Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman konseptual peserta, tetapi juga melatih keterampilan praktis dalam menyusun *policy paper* sesuai kebutuhan pembuat kebijakan. Hasil pelatihan berbasis simulasi menunjukkan adanya peningkatan keterampilan penulisan hingga lebih dari 30% pada birokrat lokal yang sebelumnya tidak terbiasa dengan analisis kebijakan berbasis bukti (Rosa et al., 2023). Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang rekomendasi kebijakan yang strategis dan relevan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Program ini bertujuan untuk mengubah orientasi kerja staf Litbang Kabupaten Alor dari tugas administratif menjadi lebih inovatif dan progresif dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Melalui pelatihan terstruktur, peserta akan memperoleh pemahaman dan pengalaman praktis dalam menyusun *policy paper*, mulai dari identifikasi isu hingga rekomendasi kebijakan aplikatif.

Dengan meningkatnya kemampuan staf, Litbang Kabupaten Alor diharapkan berperan lebih aktif dalam pengambilan kebijakan lokal, sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan institusi dan individu dalam pembangunan. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan Litbang, menciptakan budaya kerja inovatif yang mendukung kebijakan berbasis bukti. Pada akhirnya, program ini diharapkan menjadi

solusi aplikatif yang menyinergikan penelitian, advokasi kebijakan, dan pengambilan keputusan untuk memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Alor.

B. METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 30 peneliti di Litbang Kabupaten Alor dalam menyusun *policy paper* berbasis bukti. Litbang merupakan lembaga strategis yang bertugas mendukung kebijakan daerah melalui penelitian dan rekomendasi berbasis data. Namun, lembaga ini masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan advokasi kebijakan berbasis bukti, sehingga penguatan kapasitas staf menjadi prioritas yang mendesak.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif untuk memperkuat pemahaman konsep advokasi kebijakan dan teknik penulisan *policy paper*. Diskusi kelompok terarah (FGD) dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu kebijakan lokal dan memperkaya wawasan peserta melalui pertukaran pengalaman. Simulasi praktik dilakukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam menyusun dan mempresentasikan *policy paper* yang relevan dengan konteks kerja mereka.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan komunikasi intensif antara tim pengabdian dan Litbang Kabupaten Alor guna memahami kebutuhan spesifik peserta serta isu-isu kebijakan yang relevan. Dalam diskusi awal ini, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama Litbang, seperti pengelolaan sumber daya lokal, pengembangan wilayah, dan perbaikan pelayanan publik, diidentifikasi sebagai dasar untuk merancang pelatihan. Informasi ini menjadi landasan dalam menyusun materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan nyata peserta. Tim pengabdian kemudian menyusun kurikulum yang terdiri dari tiga modul utama, yaitu konsep dasar advokasi kebijakan, teknik penulisan *policy paper*, dan simulasi praktik penulisan. Selain itu, persiapan logistik juga dilakukan dengan matang, termasuk penyediaan modul pelatihan, alat presentasi, dan kebutuhan administrasi seperti absensi peserta. Koordinasi yang baik dengan Litbang dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta dan fasilitas pendukung di lokasi kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

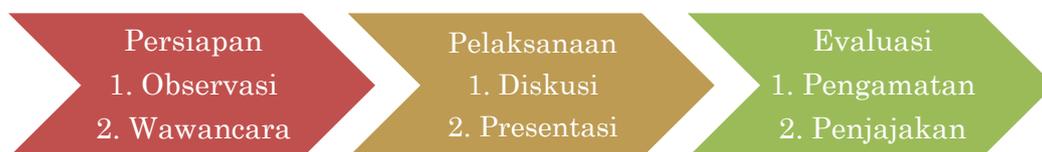
Pelaksanaan kegiatan di Kantor Litbang Kabupaten Alor melibatkan 30 peneliti dan staf dengan tiga sesi utama: ceramah interaktif, teknik penulisan *policy paper*, dan simulasi praktik. Sesi ceramah membahas konsep advokasi kebijakan dan pentingnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam pengambilan keputusan. Diskusi interaktif

setelah ceramah memberikan ruang bagi peserta untuk menggali pemahaman, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan tantangan kebijakan yang mereka hadapi di lapangan.

Sesi berikutnya berfokus pada teknik penulisan *policy paper*, di mana peserta mempelajari sistematika penyusunan, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, hingga formulasi rekomendasi kebijakan. Studi kasus nyata digunakan untuk menghubungkan teori dengan praktik. Pada sesi simulasi, peserta bekerja dalam kelompok untuk menyusun dan mempresentasikan *policy paper* berdasarkan isu kebijakan yang relevan, mendapatkan masukan dari narasumber dan peserta lain. Metode ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kolaborasi dan penerapan pendekatan berbasis bukti dalam penulisan kebijakan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dan dampaknya terhadap peserta. Evaluasi mencakup pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta tentang advokasi kebijakan dan penulisan *policy paper*. Selain itu, tim pengabdian melakukan observasi langsung selama pelatihan untuk mencatat tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta dalam diskusi maupun simulasi. Umpan balik juga dikumpulkan melalui diskusi reflektif di akhir sesi, di mana peserta memberikan masukan terhadap materi dan metode pelatihan yang telah disampaikan, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan efektif (lihat Gambar 2). Kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan Litbang Kabupaten Alor guna memahami kebutuhan dan ekspektasi peserta. Dalam koordinasi ini, dilakukan diskusi untuk mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang menjadi perhatian utama Litbang. Isu-isu tersebut mencakup pengelolaan sumber daya lokal, strategi pembangunan wilayah, serta perbaikan pelayanan publik, yang semuanya relevan dengan konteks Kabupaten Alor. Pendekatan ini sejalan dengan praktik identifikasi isu lokal yang mendorong efektivitas kebijakan berbasis bukti dalam mendukung kebutuhan spesifik daerah (Mulyadi, 2016).

Selain identifikasi isu kebijakan, tahap persiapan juga mencakup penyusunan kurikulum pelatihan. Tim pengabdian merancang kurikulum yang terdiri dari tiga modul utama: konsep advokasi kebijakan, teknik penulisan *policy paper*, dan simulasi praktik. Modul ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara teori dan praktik, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep dasar tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kerja mereka. Pendekatan yang mengombinasikan teori dan praktik terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam program berbasis kebijakan public (Susilawati et al., 2022).

Penyusunan materi pelatihan melibatkan analisis kebutuhan peserta berdasarkan wawancara awal dan survei singkat tentang pengalaman mereka dalam menyusun *policy paper*. Analisis kebutuhan ini penting untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan tingkat pemahaman peserta, memastikan bahwa hasil pelatihan dapat langsung diterapkan dalam konteks kerja mereka.

Persiapan logistik juga menjadi bagian penting dalam tahap ini. Tim memastikan semua kebutuhan teknis seperti modul pelatihan, alat peraga, dan sarana penunjang (seperti LCD proyektor) tersedia dengan baik. Selain itu, jadwal kegiatan disusun secara terstruktur untuk mengoptimalkan waktu pelatihan yang tersedia. Peserta juga diberi informasi awal mengenai jadwal, materi, dan tujuan pelatihan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri sebelum kegiatan dimulai. Logistik yang terencana dengan baik mendukung kelancaran pelaksanaan dan keterlibatan aktif peserta (Izdihar et al., 2023).



Gambar 2. Persiapan Tim PkM Sebelum Kegiatan Dimulai

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Kantor Litbang Kabupaten Alor, dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri dari peneliti dan staf Litbang (lihat Gambar 3). Tahap ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik, mencakup pemahaman konseptual, keterampilan teknis, dan praktik langsung. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, kegiatan pelatihan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi. Pendekatan ini sejalan dengan

praktik pelatihan kolaboratif yang telah terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan di berbagai konteks pengambilan keputusan publik di Indonesia (Rasaili & Arifin, 2022).

Sesi pertama dimulai dengan ceramah interaktif yang membahas konsep dasar advokasi kebijakan. Narasumber memaparkan pentingnya advokasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) sebagai alat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian advokasi kebijakan, manfaatnya, dan peran penting Litbang dalam menyediakan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengambil keputusan. Konsep ini juga selaras dengan pendekatan partisipatif yang digunakan dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti (Pratiwi, 2019).



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Policy Brief* oleh Tim Undana

Ceramah ini dilengkapi dengan diskusi interaktif, di mana peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait peran mereka dalam mendukung kebijakan publik. Beberapa peserta berbagi tantangan yang mereka hadapi, seperti minimnya data yang tersedia atau kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap pentingnya rekomendasi berbasis bukti. Diskusi ini memperkaya wawasan peserta dan menciptakan suasana kolaboratif yang mendukung pembelajaran bersama.

Sesi kedua berfokus pada teknik penulisan *policy paper*, di mana peserta diajarkan elemen-elemen utama yang harus ada dalam sebuah *policy paper*. Narasumber menjelaskan secara rinci sistematika penulisan yang mencakup bagian latar belakang, identifikasi masalah kebijakan, analisis penyebab, opsi kebijakan, serta formulasi rekomendasi. Penjelasan ini didukung oleh penggunaan studi kasus yang relevan, seperti isu pengelolaan sumber daya lokal di Kabupaten Alor. Studi kasus ini membantu peserta memahami bagaimana pendekatan berbasis bukti dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Pada sesi ini, peserta juga diberi kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu kebijakan yang relevan dengan tugas mereka. Dalam kelompok kecil, mereka berdialog mengenai isu spesifik yang memerlukan perhatian, seperti strategi pembangunan wilayah atau pengembangan layanan publik. Diskusi

ini membantu peserta mengidentifikasi masalah kebijakan yang mereka anggap prioritas, sekaligus memahami bagaimana pendekatan berbasis bukti dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan ini telah digunakan secara efektif dalam pelatihan kebijakan berbasis komunitas di Indonesia (Utami & Ekawati, 2022).

Sesi ketiga merupakan simulasi praktik, yang menjadi inti dari pelatihan ini (lihat Gambar 4). Dalam simulasi ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan isu kebijakan yang telah mereka pilih sebelumnya. Setiap kelompok diminta untuk menyusun *policy paper* dengan menggunakan kerangka kerja yang telah diajarkan. Simulasi praktik ini telah digunakan secara efektif dalam konteks pelatihan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan penyusunan dokumen berbasis bukti (Emilda et al., 2022).



Gambar 4. Pelaksanaan Simulasi Praktik Pembuatan *Policy Brief* oleh Tim Undana

Setelah menyelesaikan penyusunan *policy paper*, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan forum. Presentasi ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk melatih kemampuan komunikasi mereka, serta menerima umpan balik konstruktif dari narasumber dan peserta lainnya. Proses ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan sekaligus memberikan pembelajaran tambahan bagi peserta. Umpan balik yang diberikan mencakup kejelasan analisis, relevansi rekomendasi kebijakan, dan kelengkapan elemen dalam *policy paper*.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan beberapa keberhasilan penting. Pertama, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang konsep advokasi kebijakan dan teknik penulisan *policy paper*. Mereka tidak hanya memahami elemen-elemen dasar dalam penyusunan dokumen, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam simulasi yang dilakukan. Kedua, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam pelatihan ini berhasil menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran kolaboratif. Peserta merasa lebih percaya diri untuk berbagi pengalaman dan belajar dari rekan mereka, sehingga memperkaya wawasan mereka tentang praktik advokasi kebijakan.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam menganalisis data atau menyusun rekomendasi yang relevan dengan konteks lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa keterampilan yang telah diperoleh dapat diterapkan secara optimal dalam tugas mereka sehari-hari. Selain itu, masih terdapat persepsi di antara beberapa peserta bahwa advokasi kebijakan bukan merupakan kompetensi utama mereka sebagai ASN, yang menjadi hambatan psikologis dalam mengadopsi pendekatan ini secara penuh.

Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan kegiatan PkM ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun *policy paper* yang berbasis bukti. Metode yang digunakan, termasuk ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi praktik, terbukti efektif dalam memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta. Pendekatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan ruang bagi peserta untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan hasil ini, kegiatan PkM diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi Litbang Kabupaten Alor, khususnya dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

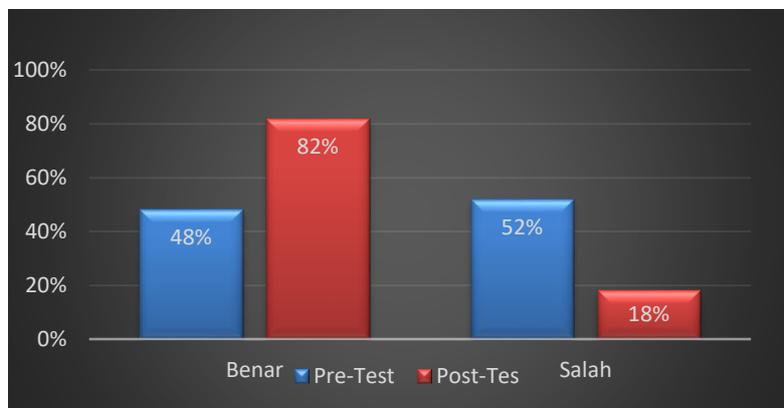
3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam meningkatkan kapasitas peserta, khususnya dalam penulisan *policy paper* berbasis bukti. Evaluasi ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu pre-test dan post-test, observasi langsung selama kegiatan, serta pengumpulan umpan balik dari peserta. Hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan keberhasilan kegiatan, tetapi juga memberikan masukan yang relevan untuk pengembangan program di masa mendatang. Pendekatan evaluasi semacam ini sejalan dengan prinsip evaluasi kinerja program dalam konteks kebijakan publik di Indonesia (Rakhsan et al., 2023).

Evaluasi dimulai dengan pelaksanaan pre-test sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur pemahaman awal peserta tentang advokasi kebijakan dan teknik penulisan *policy paper*. Pre-test terdiri dari 15 soal pilihan ganda yang mencakup elemen-elemen penting dalam penulisan *policy paper*, seperti identifikasi masalah kebijakan, analisis penyebab, dan formulasi rekomendasi. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata skor peserta berada pada angka 48%, dengan sebagian besar peserta hanya memahami konsep dasar tanpa mampu mengaplikasikannya dalam konteks kebijakan.

Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, peserta mengikuti post-test dengan soal yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, di mana rata-rata skor

peserta meningkat menjadi 82%. Hasil seperti ini mencerminkan efektivitas pendekatan pembelajaran partisipatif dan berbasis praktik dalam meningkatkan pemahaman peserta. Grafik perbandingan hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Diagram hasil evaluasi pre-test dan post-test

Gambar 5 menunjukkan peningkatan yang konsisten pada semua peserta. Jika pada pre-test hanya sekitar 40% peserta yang mencapai skor lebih dari 70%, maka pada post-test angka ini meningkat menjadi lebih dari 85%. Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi praktik yang diterapkan dalam pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kemampuan peserta dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, yang sebelumnya menjadi salah satu tantangan utama mereka. Data ini juga menunjukkan bahwa peserta yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas dapat mengejar ketertinggalan dengan pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan berbasis praktik (Jamil et al., 2022).

Selain tes tertulis, evaluasi juga dilakukan melalui observasi langsung selama pelatihan. Tim pengabdian mencatat partisipasi aktif peserta dalam setiap sesi, khususnya dalam diskusi interaktif dan simulasi praktik. Observasi menunjukkan bahwa sekitar 75% peserta aktif terlibat dalam diskusi, baik melalui pertanyaan maupun kontribusi dalam kelompok kecil. Partisipasi aktif ini merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keterlibatan peserta selama kegiatan, yang juga relevan dalam konteks peningkatan kapasitas kebijakan publik (Rusliandy, 2022b). Observasi juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi peserta selama simulasi. Beberapa kelompok menghadapi kesulitan dalam menganalisis data kebijakan dan menyusun rekomendasi yang relevan dengan konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pemahaman, masih diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal.

Evaluasi juga melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta melalui diskusi reflektif di akhir sesi. Peserta memberikan tanggapan positif

terhadap materi dan metode yang digunakan, dengan banyak yang menyatakan bahwa pelatihan ini relevan dengan tugas mereka di Litbang. Beberapa peserta mengapresiasi penggunaan studi kasus lokal, yang membantu mereka memahami bagaimana elemen-elemen dalam *policy paper* dapat diterapkan dalam konteks kerja mereka. Pendekatan berbasis kasus ini telah digunakan secara luas dalam pelatihan kebijakan di Indonesia untuk meningkatkan relevansi pembelajaran (Rasaili & Arifin, 2022).

Namun, peserta juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan. Sebagian besar peserta menyarankan agar durasi pelatihan diperpanjang untuk memberikan lebih banyak waktu dalam mendalami materi dan melakukan praktik. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar pelatihan diikuti dengan pendampingan lanjutan untuk membantu mereka menyusun *policy paper* yang lebih aplikatif di lingkungan kerja masing-masing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun *policy paper* berbasis bukti. Data pre-test dan post-test, didukung dengan hasil observasi dan umpan balik peserta, menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga potensi dampak jangka panjang bagi Litbang Kabupaten Alor.

Dengan hasil yang positif ini, tahap evaluasi juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan program di masa depan. Pendampingan lanjutan dan penyediaan studi kasus tambahan yang lebih kompleks dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat keterampilan peserta. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan satu kali, tetapi juga menjadi model pelatihan berkelanjutan yang dapat direplikasi di institusi lain.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini telah berhasil meningkatkan kapasitas peneliti dan staf Litbang Kabupaten Alor dalam menyusun *policy paper* berbasis bukti. Dengan pendekatan sistematis yang mencakup ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi praktik, pelatihan ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan, tercermin dari peningkatan skor rata-rata peserta dari 48% pada pre-test menjadi 82% pada post-test. Peserta tidak hanya memahami elemen-elemen dasar dalam penyusunan *policy paper*, tetapi juga mampu mengaplikasikannya melalui simulasi praktik yang dirancang untuk mengatasi isu-isu kebijakan lokal. Pendekatan partisipatif yang diterapkan tidak hanya memperdalam pemahaman peserta, tetapi juga membangun komitmen mereka untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari. Program ini juga memperkuat posisi Litbang sebagai lembaga strategis yang mampu

memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Keberhasilan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program di masa depan. Untuk memastikan dampak yang lebih berkelanjutan, program serupa dapat mencakup pendampingan intensif bagi peserta dalam menyusun *policy paper* yang lebih aplikatif, disertai dengan pengayaan materi menggunakan studi kasus yang lebih kompleks. Selain itu, durasi pelatihan yang lebih panjang dapat memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendalami materi secara komprehensif. Kerja sama yang lebih erat antara Litbang, pemerintah daerah, dan universitas juga dapat mendukung keberlanjutan program, menjadikan pelatihan ini bagian dari upaya pengembangan kapasitas ASN yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, pelatihan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan di Kabupaten Alor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada DIPA FISIP Universitas Nusa Cendana Tahun 2024 atas dukungan dan pembiayaan yang memungkinkan terlaksananya Program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Dukungan ini berperan penting dalam memperkuat kapasitas Litbang Kabupaten Alor dan mendukung peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In *Alfa Beta*.
- Bache, I. (2020). Evidence, Policy and Wellbeing. In *Evidence, Policy and Wellbeing*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-21376-3>
- De Marchi, G., Lucertini, G., & Tsoukiàs, A. (2016). From evidence-based policy making to policy analytics. *Annals of Operations Research*, 236(1). <https://doi.org/10.1007/s10479-014-1578-6>
- Dwi Widyantari Utami, K., & Ekawati, N. K. (2022). Persepsi Pelaku Usaha (Coffee Shop) Terhadap Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Denpasar. *Archive Of Community Health*, 9(2). <https://doi.org/10.24843/ach.2022.v09.i02.p06>
- Emilda, E., Pratiwi, M. P., Wulandari, F. T., & Anjani, R. (2022). Pelatihan Komputer Dasar Dan Pemanfaatan Internet Bagi Siswa Untuk Mendukung Pembelajaran Daring. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2). <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i2.7938>
- Fan, S., Zhang, T., & Li, M. (2021). The credibility and bargaining during the process of policy implementation—a case study of China's prohibition of open burning of crop straw policy. *Journal of Chinese Governance*, 6(2). <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1765453>
- Figuroa, R., & Verma, R. (2023). Constituent-driven health policy informed by policy advocacy literature. In *Translational Behavioral Medicine* (Vol. 13, Issue 5). <https://doi.org/10.1093/tbm/ibac116>
- Giest, S. (2017). Big data for policymaking: fad or fasttrack? *Policy Sciences*, 50(3). <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9293-1>
- Izdihar, M. D., Wahyudi, N., Putra, P. P., Firmansyah, S., & Wijaya, S. (2023).

- Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Pada Kendaraan. *Akuntansiku*, 1(4). <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.338>
- Jamil, A. F., Khusna, A. H., & Kholimi, A. S. (2022). Pelatihan Asesmen Kompetensi Minimum Dalam Pembuatan E-Modul Matematika Pada Polysynchronous Learning. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6432>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. In *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Pratiwi, C. S. (2019). Membangun Strategi Advokasi Kebijakan Publik Yang Progresif dan Massive Untuk Memenuhi HAM Warga Negara (Building a Progressive and Massive Public Policy Advocacy Strategy to Meet the Rights of Citizens). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3310867>
- Rakhsan, R. R., Said, M., & Yunus, K. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Penyusunan Anggaran Pada Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(2). <https://doi.org/10.35965/jbm.v5i2.1925>
- Rasaili, W., & Arifin, S. (2022). Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangun Pedesaan. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3). <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.795>
- Ritter, A., Hughes, C. E., Lancaster, K., & Hoppe, R. (2018). Using the Advocacy Coalition Framework and Multiple Streams policy theories to examine the role of evidence, research and other types of knowledge in drug policy. *Addiction*, 113(8). <https://doi.org/10.1111/add.14197>
- Rosa, A. T. R., Fitria, J. R., Syahroni, M. J., Budiman, K., & Novia, T. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kreasi Mahasiswa Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.32493/kmm.v3i2.31137>
- Rusliandy. (2022a). Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1).
- Rusliandy, R. (2022b). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629>
- Stylianios Kostas. (2017). Policy Papers. In *Journal of Identity and Migration Studies* (Vol. 11, Issue 1).
- Susilawati, E., Khaira, I., & . A. (2022). Penerapan Model Penilaian Berbasis Teknologi Digital Ases Untuk Meningkatkan Aktifitas Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Kebijakan Publik. *Jurnal Teknologi Pendidikan (JTP)*, 15(1). <https://doi.org/10.24114/jtp.v15i1.33761>
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In *Malang: Bayu Media*.
- Young, E., & Quinn, L. (2002). Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe. In *Budapest: Open Society Institute*.
- Zhang, L., Chen, K., & Zhao, J. (2020). *Evidence-Based Decision-Making for a Public Health Emergency in China: Easier Said Than Done*. <https://doi.org/10.1177/0275074020942410>